

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana implementasi identitas dan mentalitas historis masa lampau dalam praktik politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan, ditelaah dalam studi kasus diplomatik dan militeristik. Disokong oleh aspek ekonomi, militer, dan politik yang kuat, Tiongkok beradaptasi menjadialah satu negara terkuat di kawasan Asia Timur dan global. Dinamika perjalanan kontemporer Tiongkok dan Taiwan dimulai ketika terjadi perang saudara Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dari periode tahun 1927-1949. Peperangan dimenangkan oleh PKT menyebabkan pihak Kuomintang melarikan diri ke pulau Formosa dan kemudian membentuk negara Taiwan.

Sikap politik luar negeri Tiongkok era Presiden Xi Jinping cenderung asertif dan lebih aktif. Hal ini didasarkan pada prinsip *zhou chuqu*, dalam harfiah yang berarti “membangun di luar negeri”. Hal ini selaras dengan prinsip tiga harmoni, pertama *heping* (mewujudkan perdamaian dunia), kedua *he-jie* (penyatuan dengan Taiwan), dan ketiga *hexie* (mewujudkan tatanan masyarakat domestik yang harmonis). Dewasa ini dalam politik luar negeri, Tiongkok berupaya membentuk identitas sebagai kekuatan global (Noesselt, 2014). Dalam melihat politik luar negeri Tiongkok, perlu memahami historis peradaban Tiongkok lampau. Tradisi historis menjadi fundamen dalam politik luar negeri, dimana kebijakan yang diambil mempunyai referensi identitas dan pemikiran masa lampau.

Budaya strategis Tiongkok menempatkan budaya sebagai suatu unsur utama sebagai suatu ide gagasan yang dari masa lampau dimana bersifat mengakar kuat secara kolektif dalam sejarah peradaban Tiongkok sebagai suatu bangsa dan negara (Alastair, 1995). Budaya strategis tersebut, berasal dari identitas dan mentalitas Zhongguo, Zhong yang bermakna negeri dan Gou bermakna tengah. Dimana wilayah-wilayah yang terdapat di sekitar wilayah Tiongkok merupakan kekuasaannya, hal ini selaras pandangan Tiongkok terhadap Taiwan (Alastair, 1995). Di dalam konstruksi pembentukan kebijakan politik luar negeri, tradisi historis mentalitas dan identitas Zhongguo merupakan faktor yang mempengaruhi Tiongkok (Hess, 2012). Berbicara perilaku Tiongkok dalam kebijakan luar negeri, budaya serta falsafah-falsafah lain menjadi aspek yang cukup fundamental. Tiongkok memosisikan dirinya sebagai suatu aktor negara peradaban yang berasal dari identitas masa lampau, maka akan sangat sulit jika memahami perilaku Tiongkok tanpa melihat unsur jejak historis dimasa lampau (Jacques, 2009).

Dalam skripsi ini, memahami bahwa tradisi historis dan kejayaan lampau membuat perasaan unggul bagi Tiongkok. Kesadaran tercipta dari enggan mengulangi abad penghinaan dan perasaan berhasil dalam revolusi sejak akhir tahun 1970 an (Hess, 2012). Keunggulan Tiongkok berawal dari era kekaisaran sekitar tahun 1000 SM (Jacques, 2009).

Dalam zaman tersebut, implementasi keunggulan Tiongkok dalam bentuk *tributary system*, yang mana wilayah-wilayah sekitar membayar upeti sebagai timbal balik atas perlindungan dari kekaisaran Tiongkok (Jacques, 2009). Konteks keunggulan tidak hanya terkait kejayaan Tiongkok masa lampau, tetapi juga

bagaimana Tiongkok dalam melihat etnis dan budayanya yang berbeda dan lebih unggul dari lainnya, berkaitan dengan kekayaan Tiongkok masa lalu yang mana sebagai sebuah kekuatan politik, ekonomi, pusat kebudayaan, dan peradaban di Asia (Hess,2012).

Dalam skripsi ini, akan berfokus dalam implementasi identitas dan mentalitas mempengaruhi dalam politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan. Dipilih dibanding konsep-konsep lain seperti realisme, sebab membahas terkait identitas dan mentalitas Tiongkok sebagai bangsa yang memandang dirinya sendiri dan bangsa yang unggul, serta bagaimana identitas tersebut memandang hubungan dan cara berpikir Tiongkok dengan dunia luar (Hess, 2012). Berbicara terkait Tiongkok, dimana memiliki karakteristik yang berbeda dengan penafsiran pemikiran barat seperti contohnya realisme yang ditawarkan oleh Mearsheimer.

Bangsa Tiongkok memiliki cara pandang yang sangat hirarkis dalam ras dan budaya, berangkat dari kepercayaan diri dan sejarah panjang kejayaannya sebagai pusat peradaban yang ketimuran (Jacques, 2009). Upaya Tiongkok untuk mengembangkan pengaruh dan legitimasinya atas Taiwan melalui kebijakan satu Tiongkok tahun 1979 yang di sintesiskan kemudian dalam Konsensus 1992 sebagai manuver untuk memperlemah legitimasi diplomatik Taiwan sebagai suatu negara (Michael J, 2017). Keadaan geopolitik Tiongkok dan Taiwan sangat berpengaruh terhadap kawasan Asia Timur dan global. Relasi keduanya mengalami titik didih ketika rezim Tsai Ing-Wen naik tampuk kekuasaan Pergantian kekuasaan Taiwan dari Ma Ying-Jeou ke Tsai Ing-Wen tahun 2016 berpengaruh terhadap hubungan dengan Tiongkok.

Hal ini disebabkan Tsai menolak konsensus 1992 terkait kebijakan satu negara dua sistem (Kristin Huang, 2021). Rezim Tsai Ing Wen mengambil sikap dingin terhadap Tiongkok, hal ini dipengaruhi oleh Partai Progresif Demokratik partai asal Tsai Ing Wen yang memiliki orientasi politik lepas dari pengaruh Beijing (SCMP, 2016). Sedangkan di era presiden Ma Ying-Jeou sepakat dengan konsensus 1992 dimana Taiwan kooperatif dengan kebijakan Konsensus 1992, sedangkan era Tsai Ing-Wen menolak konsensus tersebut, sebab jika setuju maka kedepan akan terjadinya ketergantungan yang akan membatasi kedaulatan Taiwan di masa depan. Sikap penolakan tersebut menyebabkan Tiongkok memutuskan komunikasi resmi sejak tahun 2016 serta upaya menghukum Taiwan secara diplomatik dan manuver peningkatan aktivitas militer (CRF, 2022).

Tercatat sejak tahun 2016 hingga 2024 terjadi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Taiwan dengan alasan lebih memilih mendukung Tiongkok, terdapat sepuluh negara yaitu Sao Tome and Prin, Panama, Dominican Republic, Burkina Faso, El Salvador, Kiribati, Solomon Island, Nicaragua, Honduras, dan Nauru. Selain itu terjadi peningkatan aktivitas militer Tiongkok terhadap Taiwan sejak tahun 2016. Tiongkok memiliki keinginan kuat untuk meneguhkan legitimasi kebijakan satu Tiongkok.

Sebab dalam buku putih Tiongkok, memasukan penyatuan Taiwan menjadi tak terpisahkan. Tujuan politik melalui militer dan diplomatik merupakan cara terbaik untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara (Dessein, 2009). Hal ini sejalan dengan konsep dan narasi Tiongkok tentang tatanan politik internasional yang percaya bahwa tidak bisa ada dua matahari di satu langit (Ford, 2010).

Selain itu sesuai dengan salah satu dari tiga prinsip harmoni Tiongkok yaitu *he-jie* “penyatuan dengan Taiwan”. Dalam hal ini penyelarasan kedaulatan dan kekuasaan melalui aspek Konsensus 1992 oleh Tiongkok terhambat oleh Taiwan. Identitas dan Mentalitas masa lampau Tiongkok, membangun pemahaman strategis dan bertahan lama dengan peran serta keberhasilan kejutan militer, diplomatik, dalam urusan politik antar negara (Alastair, 1995). Postur politik luar negeri kontemporer Tiongkok menjadi tugas, proaktif dan asertif dalam isu-isu internasional yang berhubungan langsung dengan prinsip dan kepentingan yang berusaha Tiongkok capai. Sikap asertif ditunjukkan dalam kasus Taiwan dan sengketa LCS.

Hal ini memperlihatkan bahwa Tiongkok akan menjadiasertif dalam politik luar negerinya, yang utama berhubungan langsung dengan kepentingan nasionalnya. Sebab Presiden Xi Jinping memiliki visi mewujudkan “The Great Rejuvenation”, dalam rangka mengembalikan kedudukan tradisional Tiongkok sebagai sebuah kekuatan regional dan global secara dominan (Rachman, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas , penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu, :
Bagaimana Identitas dan Mentalitas Tiongkok masa lampau dalam mempengaruhi Politik Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Bagaimana implementasi identitas serta mentalitas Konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) era Presiden Xi Jinping dalam mempengaruhi politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan sebagai upaya peneguhan kedaulatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan analisis secara deskriptif bagaimana konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dalam mempengaruhi politik luar negeri Tiongkok era Presiden Xi Jinping.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik keilmuan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP terkait fenomena politik luar negeri Tiongkok, dan membantu penelitian baru di masa mendatang. Serta bisa dijadikan referensi atau literatur penunjang terkait konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dalam politik luar negeri Tiongkok.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara khusus menunjang penelitian baru masa mendatang, dimana penelitian ini dapat memberikan *state of art* bagaimana penggunaan konsep Negeri Tengah untuk menganalisis fenomena politik luar negeri Tiongkok.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Rosyidin (2017) dalam Budaya Strategis Tiongkok dan Tantangan Manajemen Keamanan Dalam Sengketa Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan konstruktivis budaya secara diskursif yang menganalisis perilaku agresif Tiongkok dalam ketegangan di LCS. Dimana Tiongkok menggunakan budaya strategis fundamen Taoisme dan dorongan mentalitas *Middle Kingdom*. Kawasan LCS sendiri dalam hal ini menurut Tiongkok merupakan cakupan mereka. Penelitian ini lebih menonjolkan konsep Taoisme yang mempengaruhi perilaku Tiongkok dalam sengketa LCS. Dalam penelitian ini lebih menonjolkan pengaruh identitas dan budaya konfusianisme Taoisme dalam mengkaji perilaku Tiongkok di LCS.

Merujuk penelitian Fitri Mardikas Teddy (2018) bahwa sejatinya Tiongkok dalam penerapan politik luar negerinya, mengadopsi identitas dan mentalitas Negeri Tengah terhadap negara-negara Afrika. Hal tersebut dilakukan membangun kekuatan global Tiongkok akibat bayang-bayang identitas dan kejayaan masa lalu. Penelitian ini lebih menonjolkan kontrol dan dominasi Tiongkok melalui forum kerjasama.

Merujuk karya Stephen Chan (2013), bahwa identitas Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) membuat ambisi Tiongkok meluas hingga sampai Afrika. Dimana Tiongkok menggap bahwa mereka adalah negara pinggiran. Perbedaan dalam literatur penelitian ini lebih menjelaskan meluasnya pengertian negara pinggiran oleh Tiongkok di fase kontemporer.

Dilihat dari penelitian Gideon Rachman (2017), Implementasi konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dalam sub kompleks hubungan Tiongkok dan negara tetangga atau sekitarnya, diwarnai dengan politik luar negeri Tiongkok yang asertif hal ini disebabkan kembalinya identitas dan mentalitas sebagai Negeri Tengah. Sub kompleks cakupan dalam penelitian ini general, dimana tidak terlalu menitik fokuskan dalam satu negara negara.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dengan bahasan Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) Tiongkok. Penelitian ini tidak hanya menemukan kekosongan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi dalam sub kompleks baru yaitu implementasi konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) sub kompleks Taiwan. Dimana penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi Negeri Tengah dalam cakupan lebih dari satu negara.

1.5.1 Negeri Tengah (*Middle Kingdom*)

Christian Hess, dalam *Handbook of China's International Relations* menuliskanya berjudul "The Use of History in China's Foreign Relations, dimana menjelaskan peranan sejarah identitas dan mentalitas mempengaruhi dalam praktik hubungan politik luar negeri Tiongkok. Dalam artikel tersebut Christian Hess menjelaskan terdapat konsep yang beranjakdari tradisi historis identitas dan mentalitas Tiongkok : Negeri Tengah. Tiongkok dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Zhongguo, dimana Zhong yang bermakna tengah, dan guo yang bermakna kerajaan atau negeri (Rachman, 2017). Tiongkok sebagai Negeri Tengah memiliki aspek yang disebut Tianxia "all under heaven" dimana sebagai teritorial atau wilayah yang diperintah oleh

kekuasaan Tianzi atau “the son of heaven”. Di dalam sekitar Tianxia, wilayah atau teritorial disebut sebagai strategic periphery dan cara berhubungan tributary system (Zhao, 2006).

Tiongkok sebagai core atau inti yang mana dikelilingi oleh teritori atau negara-negara pinggiran yang disebut strategic periphery yang membentuk pola relasi hirarkis yang mana dengan pola tributary system. Pola hubungan ini kemudian berkembang menjadi pengakuan kedaulatan, kekuasaan atas keunggulan Tiongkok (Mitchell, 2007).

Tiongkok sebagai sebuah Negeri Tengah memiliki kendali kekuasaan atas negara-negara atau teritori sekitar terkhusus dalam wilayah strategic periphery. Apabila suatu negara menerima legitimasi kedaulatan identitas unggul Tiongkok, maka mereka akan memberikan akses kerjasama, bantuan, legitimasi politik dan keuntungan lain, akan tetapi jika tidak menerima legitimasi tersebut maka mereka akan mendapat determinasi militer, diplomatik (Brands, 2015). Ditelisik dalam hubungan Tiongkok dan Taiwan, terdapat hubungan ekonomi, tetapi tetap menjadikan Tiongkok asertif terhadap Taiwan.

Dalam *tributary system* Tiongkok berupaya untuk memperlihatkan dirinya bahwa mereka sebagai Negeri Tengah dengan mengimplementasikan berbagai bentuk kebijakan terhadap negara-negara yang ikut dalam tatanan dunia versi Tiongkok (Jacques, 2009). Kebijakan Satu Tiongkok merupakan salah satu kebijakan yang hingga saat ini menjadi target utama, yang dimana dalam konsep Negeri Tengah, dalam pemerintahan *Tianxia*, unitary power dalam

satu kesatuan teritorial merupakan sebuah hal mutlak dan keharusan (Ford, 2010). Dalam hal ini, di implementasikan Tiongkok terhadap Taiwan. Bagaimana dalam mempengaruhi politik luar negeri terhadap Taiwan. Tradisi historis Tiongkok membentuk konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) sebagai bangsa yang unggul dan memiliki historis kejayaan masa lalu. Tiongkok melihat dirinya sebagai bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia, yang mana membentuk perasaan unggul, dari segi budaya, identitas dan mentalitas. Tiongkok melihat keunggulan dirinya, sebab mereka melihat keunggulan peradabannya, keunggulan tersebut yang mendorong Tiongkok memiliki karakteristik identitas Sinocentric dalam tatanan global (Jacques, 2009).

Pandangan Tiongkok ini bagian dari konsep Negeri Tengah, dimana menjelaskan Tiongkok memandang dirinya sebagai pusat, dengan aspek peradaban yang mana lebih unggul. Keunggulan Tiongkok lainnya berawal dari ajaran serta nilai moral Konfusianisme dan historis kekaisaran Tiongkok masa lalu (Jacques, 2009). Tradisi historis dalam konstruksi politik luar negeri Tiongkok memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah dan tujuan politik luar negeri dari Tiongkok itu sendiri. Hal ini yang membedakan pola politik barat dalam hal ini Realisme yang diterangkan oleh Mearshimer. Adanya konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) ini dihubungkan dengan berbagai upaya Tiongkok dalam tatanan global untuk meneguhkan legitimasinya sebagai bentuk *Tianxia*.

Konsep Negeri Tengah dipilih penulis sebagai fokus penelitian, sebab telah menjadi kebudayaan, identitas, mentalitas, *strategic culture* yang dimiliki oleh Tiongkok, untuk mendapatkan status kekuatan besar, legitimasi satu Tiongkok, berkaca dengan bayangan kejayaan peradaban lampau. Dimana hal tersebut yang membedakan dengan karakteristik realisme barat seperti yang dianalisis oleh Mearshimer.

Sebab apabila diselaraskan dengan Reaslime Barat oleh Mearshimer Tiongkok dapat menyerang langsung Taiwan seperti yang dilakukan oleh Rusia dewasa ini atas Ukraina. Historis kejayaan peradaban lampau, mengkonstruksi Tiongkok dalam melihat diri mereka yang unggul dan berbeda. Hal ini kemudian membentuk dan mempengaruhi perilaku Tiongkok dalam politik luar negerinya. Pola pandangan pikir Tiongkok ini yang membentuk pandangan bahwa negara lain diluar mereka sebagai *strategic periphery* yang masuk pola *tributary system*. Hal ini tercerminkan dalam pola perilaku politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan dewasa ini, khususnya dalam era Presiden Xi Jinping.

Tiongkok sebagai Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) berusaha untuk menjadi pemimpin dan contoh negara lain, sebab diri mereka *Tianxia* (Jacques, 2009). Dalam praktiknya, konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) eksistensinya tampak secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai kebijakan politik luar negeri parapemimpin Tiongkok ambil. Dengan foreign policy low profile fase Deng Xiaoping, fase Hu Jintao dengan Peaceful Development, hingga sampai fase Xi Jinping dengan Great Rejuvenation,

dimana memiliki tujuan yang pada akhirnya menempatkan Tiongkok sebagai kekuatan regional hingga global. Kebangkitan Konsep Negara Tengah (*Middle Kingdom*) terasa kemunculannya fase kepemimpinan Xi Jinping (Doshi, 2017). Presiden Xi Jinping dalam beberapa kali pidato menyinggung keunggulan, kedigdayaan, keunggulan, peradaban, identitas, dan mentalitas Tiongkok dewasa ini.

Secara signifikan pidato Xi Jinping dalam setiap ulang tahun PKT terkait peremajaan nasional, penyatuan Taiwan dan posisi Tiongkok sebagai Great Power. Pidato Presiden Xi Jinping memiliki makna penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Tiongkok kedepan. Hal ini, merupakan indikasi bahwa pemikiran dan identitas sebagai sebuah Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) masih ada dalam pikiran sanubari pemimpin Tiongkok dewasa ini. Dimana Tiongkok sebagai pusat dunia, akan terlihat dalam ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan akibat penolakan satu Tiongkok, khususnya melalui aspek diplomatik dan militeristik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Dalam definisi konseptual penulis mendeskripsikan secara umum tentang komponen yang ada dalam konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) yaitu *Tianxia*, *Strategic Periphery* dan *Tributary System* yang akan digunakan dalam menganalisis perilaku dalam politik luar negeri Tiongkok atas Taiwan.

1. *Tianxia*

“All under heaven” satu atap kekuasaan, sebagai sebuah wilayah atau teritorial yang diperintah oleh Tianzi atau “the son of heaven.” Di sekitar *Tianxia*, terdapat wilayah yang disebut sebagai *strategic periphery* dimana Tiongkok sebagai pusat..

2. *Strategic Periphery*

Penempatan Tiongkok sebagai pusat (inti) yang dikelilingi oleh negara-negara pinggiran (*strategic periphery*) kemudian membentuk sebuah pola hubungan yang hirarkis, yang harus mengakui kedaulatan, kekuasaan Tiongkok, atau yang disebut sebagai *tributary system*.

3. *Tributary System*

Pola hubungan hirarkis yang berkembang sebagai sebuah bentuk wajib pengakuan kekuasaan atau keunggulan Tiongkok.

1.6.2 Definisi Operasional

1. *Tianxia*

Tiongkok sebagai pusat kekuasaan, hingga sekarang masih menjadikan kebijakan satu Tiongkok patokan utama, dalam buku putih Tiongkok tahun 2022 dijelaskan bahwa penyatuan Taiwan keharusan mutlak, era Presiden Xi Jinping berkesinambungan dengan Buku Putih tahun 2022 pendekatan lebih asertif. *Tianxia* dalam konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) satu kesatuan teritorial merupakan sebuah keharusan (Ford, 2010).

2. *Strategic Periphery*

Dalam perkembangannya Tiongkok dalam memaknai *strategic periphery* selain wilayah strategis sekitar Tiongkok juga wilayah-wilayah lainnya yang dibutuhkan Tiongkok. Dengan hal tersebut, Tiongkok bisa mempertahankan stabilitas domestik dan menyebarkan pengaruh kekuasaan (Mitchell, 2004).

Pola hubungan hirarkis ini, Tiongkok kontemporer melihat mereka sebagai kekuasaan dan keunggulan yang harus diakui Taiwan melalui kebijakan satu Tiongkok. Dalam hubungan yang hirarkis berkembang menjadi wajib atas pengakuan kekuasaan dan keunggulan Tiongkok.

Tiongkok sebagai sebuah Negeri Tengah memiliki kendali kekuasaan atas negara-negara atau teritori sekitar terkhusus dalam wilayah *strategic periphery*.

3. *Tributary System*

Dalam *tributary system*, Tiongkok berusaha mencitrakan bahwa dirinya sebagai Negeri Tengah dengan melakukan berbagai kebijakan atas negara-negara yang mereka untuk masuk dalam tatanan dunia versi Tiongkok (Zhang, 2006). Dalam *Tributary System*, suatu negara menerima legitimasi kedaulatan identitas unggul Tiongkok, maka mereka akan memberikan akses kerjasama, bantuan, legitimasi politik, akan tetapi jika tidak menerima legitimasi tersebut maka mereka akan mendapat determinasi militer, diplomatik (Brands, 2015).

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini berargumen bahwa, kepentingan utama dalam politik luar negeri Tiongkok yang dipengaruhi oleh konsep Negeri Tengah adalah upaya peneguhan legitimasi kedaulatan (kebijakan satu Tiongkok) atas Taiwan. Dengan menggunakan kerangka variabel Negeri Tengah, melihat bahwa Tiongkok mencoba mengupayakan legitimasi secara signifikan atas Taiwan yang merupakan *strategic periphery* bagi Tiongkok di Asia Timur dan juga memperkuat persepsi bahwa mereka adalah Tianxia dan Taiwan sebagai *strategic periphery* menolak pengakuan kekuasaan dan legitimasi (*tributary system*) satu Tiongkok yang menyebabkan adanya determinasi diplomatik dan militeristik.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode kualitatif yang dimana metode penelitian dipergunakan dalam menjelaskan suatu fenomena dengan komprehensif. Dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena dengan komprehensif maka mengumpulkan, analisis, dan interpretasi data dalam bentuk gambar ataupun kata-kata secara interpretatif (Merriam, 2009). Metode ini pada dasarnya memang sering digunakan dalam ilmu sosial dikarenakan dalam menggunakan metode kualitatif maka peneliti dapat menggunakan interpretasi mereka untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada (Qualitative,1994). Metode kualitatif biasanya akan memberikan penjelasan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analisis, dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik fenomena secara komprehensif.

Sedangkan dalam analitik untuk menganalisis komponen yang terdapat di dalamnya (Maxwell, 2013).,Komponen dalam konsep Negeri Tengah seperti *Tianxia*, *StrategicPeriphery*, dan *Tributary System*, akan membentuk analisis politik luar negeri Tiongkok.

1.8.2 Situs Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan aspek data serta informasi dengan melalui studi literatur dan sumber online. Tidak melibatkan penelitian lapangan langsung . Dimana peneliti akan mengkaji literatur serta sumber-sumber data online yang relevan dengan penelitian untuk menjelaskan perilaku Tiongkok dalam politik luar negerinya terhadap Taiwan

1.8.3 Subjek Penelitian.

Subjek utama penelitian ini adalah pemimpin Tiongkok, terutama Presiden Xi Jinping, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Tsai Ing Wen yang memberikan informasi ataupun data yang dapat menjelaskan fenomena atau studi kasus dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi konsep Negara Tengah.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif mengacu pada informasi yang berbentuk teks atau data non- numerik, khususnya pada tahap awal analisis (Schutt, 2009: 357). Jenis data yang nantinya akan dikumpulkan dapat berupa studi pustaka, artikel, buku, grafik, tabel dan gambar hingga dokumen resmi yang mendukung dan menggambarkan fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini data tersebut dapat dijadikan sumber penguatan dalam analisa dan argumen peneliti untuk membuat kesimpulan. Metode-metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer, sumber data primer diambil langsung dari teks atau pernyataan resmi dari kementerian luar negeri Tiongkok yang berkaitan dengan Taiwan dan dapat diakses langsung melalui web resmi foreign affairs Tiongkok.

Data sekunder diambil berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang sudah divalidasi keasliannya secara resmi yang dapat diambil melalui media internet atau ke perpustakaan. Data sekunder ini nantinya dipergunakan oleh peneliti untuk dianalisis hingga terciptanya suatu hipotesis. Data naratif berupa ‘politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan’ menjadi sumber data utama untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian desk research. Dengan memanfaatkan teknik ini, peneliti dapat melakukan penelitian tanpa harus hadir secara fisik di lokasi terjadinya fenomena. Sehingga peneliti dapat memperoleh wawasan tentang fenomena tersebut dari jarak jauh.

Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan dari *library research* dan *internet research* seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, makalah kebijakan, informasi dari website resmi, buku, dan dokumen dari sumber yang kredibel dan kompeten.

1.8.7 Analisis & Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik data secara naratif. Data tersebut dari politik luar negeri Tiongkok menjadi sumber utama serta menjawab pertanyaan penelitian ini. Teknis analisis data naratif merupakan suatu metode pendekatan yang diambil untuk mewawancarai data yang berkaitan dengan pemahaman bagaimana dan mengapa orang berbicara tentang kehidupan mereka sebagai sebuah cerita atau rangkaian (Gilbert, 2008).

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, memiliki data yang relevan serta sesuai dengan kriteria untuk menopang penelitian ini dari data sekunder. Data sekunder yang akan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website kementerian Tiongkok, penelitian terdahulu yang dapat dibuktikan keabsahannya.

1.9 Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang disusun menjadi 4 bab sebagai berikut ;

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan yang menjadi riset dalam penelitian ini

2. Bab 2 Perkembangan Mentalitas Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dan Ketegangan Kontemporer Tiongkok-Taiwan Era Xi Jinping.

Bab ini memuat deskripsi perkembangan konsep Negeri Tengah dan Ketegangan Kontemporer fase Xi Jinping.

3. Bab 3 Analisis Implementasi Mentalitas Negeri Tengah Dalam Hubungan Tiongkok-Taiwan fase Xi Jinping.

Bab ini memberikan analisis Implementasi Mentalitas Negeri Tengah Dalam Hubungan Tiongkok-Taiwan.

4. Bab 4 Kesimpulan

Bab ini memuat penutup dan kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Mengemukakan temuan penelitian ; apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal peneliti. Juga mengevaluasi kekurangan penelitian ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya